



Menelaah Dinamika Komunikasi Politik dalam Masyarakat Modern

Anitha Nurchalisah Thaha ^{1*}, Qudratullah ²

¹⁻² Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah,

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Korespondensi penulis: anithaur25@gmail.com

Abstract. *Political communication is a crucial element in shaping public opinion, especially in the modern era influenced by the rapid development of information technology. This study aims to analyze the dynamics of political communication in contemporary society by highlighting the role of social media, political figures, and public participation in political discourse. The research employs a qualitative approach through literature review and discourse analysis of political communication phenomena in Indonesia. The findings reveal that political communication in the modern era is two-way, interactive, and heavily influenced by the fast-paced flow of digital information. This study is expected to contribute to enhancing political literacy and deepening public understanding of contemporary political dynamics.*

Keywords: *Political Communication, Modern Society, Social Media, Public Opinion*

Abstrak. Komunikasi politik merupakan elemen penting dalam membentuk opini publik, terutama di era masyarakat modern yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi politik di tengah masyarakat kontemporer dengan menyoroti peran media sosial, tokoh politik, serta partisipasi masyarakat dalam wacana publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis wacana terhadap fenomena komunikasi politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik di era modern bersifat dua arah, interaktif, dan sangat dipengaruhi oleh kecepatan arus informasi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi politik masyarakat dan memperdalam pemahaman tentang dinamika politik kontemporer.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Masyarakat Modern, Media Sosial, Opini Publik

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, komunikasi politik telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Dengan perkembangan teknologi digital, media sosial, dan internet, aktor-aktor politik serta masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi dalam proses politik. Dinamika komunikasi politik ini membawa beberapa tantangan dan implikasi yang perlu dipahami. Komunikasi politik memiliki fungsi yang sangat penting dan menentukan demokratisasi, serta terdapat pertarungan kepentingan untuk memengaruhi, merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan yang dilakukan oleh para komunikator politik, yakni pihak elit (penguasa) maupun publik (yang dikuasai). Dalam hal ini, media massa menjadi lahan strategis dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat, serta membentuk opini publik yang mempengaruhi masyarakat (Hermin dan Indah Wahyuni, 2007).

Dalam masyarakat demokrasi, pengambilalihan kekuasaan dan peluang untuk merebut pengaruh dilakukan melalui pemilu yang demokratis dalam berbagai bentuk. Tujuannya adalah untuk memperoleh bagian suara yang cukup dalam pasar pemilu. Agar dapat memiliki pengaruh atas pihak eksekutif secara konstitusional, aktor-aktor politik menggunakan strategi kampanye yang efektif, seperti branding politik menggunakan media sosial.

Dalam kajian komunikasi politik, internet merupakan media baru generasi ketiga yang memungkinkan siapa pun menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Dengan demikian, perananan politik media di Indonesia lebih menekankan dominasi atau hegemoni kekuasaan Negara, dimana media digunakan sebagai alat propaganda Negara atau menjadi alat kepentingan untuk melestarikan ideologi penguasa. Masyarakat modern ditandai dengan kompleksitas dan dinamika yang tinggi, termasuk dalam ranah komunikasi politik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara individu dan kelompok berinteraksi dan bertukar informasi, termasuk dalam konteks politik. Hal ini memicu perubahan dalam dinamika komunikasi politik, yang perlu ditelaah secara mendalam untuk memahami realitas politik di era digital. Komunikasi politik merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan pesan yang berkaitan dengan politik. Dalam masyarakat modern, komunikasi politik menjadi semakin penting karena perannya dalam membentuk opini publik, mempengaruhi kebijakan publik, dan memobilisasi partisipasi politik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara individu dan kelompok berinteraksi dan bertukar informasi, termasuk dalam konteks politik.

Hal ini memicu perubahan dalam dinamika komunikasi politik, yang perlu ditelaah secara mendalam untuk memahami realitas politik di era digital. Era digital telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan media sosial, telah merevolusi cara individu dan kelompok berinteraksi dan bertukar informasi, termasuk dalam konteks politik. Hal ini memicu perubahan drastis dalam dinamika komunikasi politik, yang perlu dikaji secara mendalam untuk memahami realitas politik di era digital. Era digital telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan media sosial, telah merevolusi cara individu dan kelompok berinteraksi dan bertukar informasi, termasuk dalam konteks politik.

Hal ini memicu perubahan drastis dalam dinamika komunikasi politik, yang perlu dikaji secara mendalam untuk memahami realitas politik di era digital. Pergeseran pola komunikasi politik di era digital menghadirkan berbagai tantangan dan peluang. Di satu sisi, internet dan media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan partisipasi politik. Cahyawati (2020) menjelaskan bahwa internet dan media sosial dapat digunakan untuk memobilisasi partisipasi politik, seperti mengajak orang untuk mendaftar pemilih dan menggunakan hak pilih mereka (Cahyawati, 2020). Di sisi lain, internet dan media sosial juga rentan terhadap penyebaran misinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Widjaja (2021) menunjukkan bahwa hoax dan misinformasi tersebar luas di media sosial

selama pemilihan umum 2019 di Indonesia. Hoax dan misinformasi ini dapat menyesatkan pemilih dan memengaruhi pilihan mereka (Widjaja, 2021). Susilo menjelaskan bahwa media sosial seperti Facebook dan Twitter digunakan oleh kelompok-kelompok politik untuk menyebarkan ujaran kebencian dan menyerang kelompok lain. Hal ini dapat memicu polarisasi politik dan memecah belah masyarakat (Susilo, 2022).

Tantangan utama dalam komunikasi politik di era digital adalah memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan akurat dan terpercaya. Hal ini membutuhkan literasi digital yang tinggi dari masyarakat dan peran aktif dari media massa dan platform media sosial untuk memerangi misinformasi dan ujaran kebencian.

Di sisi lain, internet dan media sosial juga membuka peluang baru untuk partisipasi politik dan memperkuat demokrasi. Platform media sosial memungkinkan individu untuk terhubung langsung dengan politisi dan terlibat dalam diskusi politik secara real-time. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dari masyarakat. Dinamika komunikasi politik dalam masyarakat modern telah berubah secara signifikan dengan munculnya internet dan media sosial. Pergeseran pola komunikasi ini menghadirkan berbagai tantangan dan peluang.

Dampak komunikasi politik di era digital terhadap demokrasi tergantung pada bagaimana teknologi ini digunakan. Jika digunakan secara bertanggung jawab, internet dan media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk memperkuat demokrasi. Cahyawati (2020) menyatakan bahwa internet dan media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik, transparansi, dan akuntabilitas. Susilo (2022) menjelaskan bahwa internet dan media sosial dapat membuka ruang diskusi politik yang lebih luas dan beragam. Namun, jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, internet dan media sosial dapat melemahkan demokrasi dan menghambat partisipasi politik. Widjaja (2021) menunjukkan bahwa penyebaran misinformasi dan ujaran kebencian di media sosial dapat membuat masyarakat bingung dan apatis terhadap proses politik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan partisipasi politik dan melemahkan demokrasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis wacana. Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta informasi dari media daring. Analisis wacana digunakan untuk menelaah konstruksi pesan, strategi komunikasi, dan respons masyarakat terhadap dinamika komunikasi politik, khususnya dalam ranah media sosial dan interaksi digital antara aktor politik dan publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Era globalisasi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk ranah politik. Perkembangan teknologi digital, media sosial, dan internet telah menghadirkan transformasi fundamental dalam cara aktor-aktor politik dan masyarakat berkomunikasi dan berpartisipasi dalam proses politik. Dinamika komunikasi politik ini membawa berbagai tantangan dan implikasi yang perlu dipahami secara mendalam untuk membangun demokrasi yang sehat dan dinamis di era digital.

Pergeseran Pola Komunikasi Politik

Pada masa lampau, komunikasi politik didominasi oleh media massa tradisional seperti surat kabar, televisi, dan radio. Media-media ini berfungsi sebagai gerbang informasi utama bagi masyarakat, dan politisi menggunakannya untuk menyampaikan pesan politik mereka kepada publik.

Namun, dengan munculnya internet dan media sosial, pola komunikasi politik mengalami pergeseran yang signifikan. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas dan mudah untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber, tidak hanya terikat pada media massa tradisional. Kehadiran platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan individu untuk terhubung langsung dengan politisi, terlibat dalam diskusi politik secara real-time, dan bahkan memproduksi dan menyebarkan informasi politik mereka sendiri.

Tantangan dan Implikasi Dinamika Komunikasi Politik

Pergeseran pola komunikasi politik di era digital menghadirkan berbagai tantangan dan implikasi yang perlu dikaji secara mendalam. Berikut beberapa poin penting:

o Tantangan:

- **Penyebaran Misinformasi dan Hoax:** Internet dan media sosial menjadi ruang subur bagi penyebaran misinformasi dan hoax, yang dapat menyesatkan masyarakat dan memengaruhi pilihan politik mereka. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik dan melemahkan demokrasi.
- **Ujaran Kebencian dan Polarisasi Politik:** Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan menyerang kelompok lain, yang dapat memicu polarisasi politik dan memecah belah masyarakat. Hal ini dapat menghambat dialog dan kerjasama politik, serta menguatkan sentimen primordial.
- **Penurunan Kualitas Diskusi Politik:** Percakapan politik di media sosial sering kali bersifat singkat, dangkal, dan penuh dengan emosionalitas, sehingga menghambat diskusi politik yang berkualitas dan konstruktif.

- Kesenjangan Akses Informasi: Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital dan internet, sehingga dapat terjadi kesenjangan informasi dan partisipasi politik (Bimantara dan Mantoro, 2021).

○ **Implikasi:**

- Meningkatnya Partisipasi Politik: Kemudahan akses informasi dan platform media sosial memungkinkan individu untuk lebih mudah terlibat dalam proses politik, seperti mendaftar pemilih, menggunakan hak pilih, dan mengikuti kegiatan politik lainnya.
- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas: Internet dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah secara lebih mudah dan kritis, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
- Munculnya Aktor-Aktor Politik Baru: Media sosial membuka peluang bagi aktor-aktor politik baru untuk muncul dan membangun basis dukungan, di luar mekanisme politik tradisional.
- Perubahan Cara Kampanye Politik: Politisi menggunakan media sosial untuk berkampanye, membangun citra publik, dan terhubung dengan pemilih secara lebih personal (Taufik, 2022).

Media massa, baik media cetak, elektronik, maupun online, memiliki peran penting dalam komunikasi politik. Mereka berfungsi sebagai penyampai informasi, pembentuk opini publik, dan sarana partisipasi politik bagi masyarakat. Pergeseran pola komunikasi politik di era digital membawa dampak yang kompleks bagi masyarakat modern. Media sosial dan internet membuka peluang bagi partisipasi politik yang lebih luas, transparansi, dan akuntabilitas (Nurhidayat dan Refian 2023). Namun, misinformasi, disinformasi, polarisasi politik, dan manipulasi opini publik juga menjadi tantangan yang serius bagi demokrasi. Memahami dinamika komunikasi politik di era digital dan menerapkan etika media secara konsisten adalah kunci untuk membangun masyarakat yang demokratis, partisipatif, dan sejahtera (KPI, 2024).

Kekuatan Media dalam Komunikasi Politik:

- Penyebaran Informasi: Media massa menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat tentang peristiwa politik, kebijakan pemerintah, dan agenda politik para aktor politik.
- Pembentukan Opini Publik: Media massa dapat memengaruhi cara pandang dan keyakinan masyarakat tentang isu-isu politik melalui pemberitaan, analisis, dan editorialnya.
- Mobilisasi Politik: Media massa dapat memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, seperti mendaftar pemilih, menggunakan hak pilih, dan mengikuti aksi demonstrasi.

- Pengawasan Politik: Media massa dapat mengawasi kinerja pemerintah dan para aktor politik, serta mengungkap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- Sarana Partisipasi Politik: Media massa menyediakan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya tentang berbagai isu politik (Cahyowati dan Nugroho, 2021).

Etika Media dalam Komunikasi Politik

Mengingat kekuatannya yang besar, media massa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip-prinsip etika dalam komunikasi politik. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap media massa, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, objektif, dan berimbang. Berikut beberapa prinsip etika media dalam komunikasi politik:

- Akurasi: Media massa harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan sesuai dengan fakta.
- Objektivitas: Media massa harus menyampaikan informasi secara objektif dan tidak memihak kepada pihak manapun.
- Keseimbangan: Media massa harus memberikan ruang yang seimbang kepada berbagai pihak yang terlibat dalam isu politik.
- Netralitas: Media massa harus menjaga netralitasnya dan tidak memihak kepada kepentingan politik tertentu.
- Verifikasi: Media massa harus memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan untuk menghindari penyebaran misinformasi.
- Tanggung Jawab: Media massa harus bertanggung jawab atas informasi yang disampaikannya dan siap untuk dikoreksi jika ada kesalahan (Susilo, 2019).

Etika media memainkan peran penting dalam komunikasi politik di era digital (Kodoati, 2023). Penerapan etika media yang konsisten dan bertanggung jawab dapat membantu membangun komunikasi politik yang sehat, kredibel, dan inklusif. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi publik yang konstruktif, memperkuat demokrasi, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera (Tabroni, 2012).

Ruang Media yang Mengedepankan Kepentingan Masyarakat

Penting bagi media massa untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menjalankan perannya dalam komunikasi politik. Hal ini berarti bahwa media massa harus:

- Memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat: Media massa harus menyampaikan informasi yang mudah dipahami dan membantu masyarakat untuk memahami isu-isu politik dengan lebih baik.

- Menyediakan ruang bagi suara-suara kritis: Media massa harus menyediakan ruang bagi suara-suara kritis dari berbagai pihak, termasuk mereka yang berbeda pendapat dengan pemerintah atau elit politik.
- Memfasilitasi dialog dan diskusi: Media massa dapat memfasilitasi dialog dan diskusi antara berbagai pihak tentang isu-isu politik.
- Membangun budaya politik yang sehat: Media massa dapat membantu membangun budaya politik yang sehat dengan mendorong toleransi, saling menghormati, dan partisipasi politik yang aktif (Handayani, 2020).

Dampak Keterpihakan Media pada Politik

Keterpihakan media pada politik dapat menciptakan citra negatif media atas pemberitaan politik. Hal ini dapat terjadi ketika media massa:

- Terlalu dekat dengan kepentingan politik tertentu: Media massa yang terlalu dekat dengan kepentingan politik tertentu, seperti partai politik atau kelompok kepentingan, dapat dianggap tidak objektif dan bias dalam pemberitaannya.
- Menyebarkan misinformasi dan hoax: Media massa yang menyebarkan misinformasi dan hoax dapat merusak kepercayaan publik dan melemahkan demokrasi.
- Menyerang individu atau kelompok tertentu: Media massa yang menyerang individu atau kelompok tertentu tanpa dasar yang kuat dapat merusak reputasi mereka dan menimbulkan polarisasi politik (Hamidi, 2018).

Fungsi Politik Media

Fungsi politik media di Indonesia memang sarat dengan kompleksitas, terutama dalam konteks hubungannya dengan dominasi atau hegemoni kekuasaan negara. Di satu sisi, media massa memang kerap kali digunakan sebagai alat propaganda negara atau alat kepentingan untuk melestarikan ideologi penguasa. Hal ini terefleksikan dalam sejarah panjang media di Indonesia, di mana kontrol dan intervensi pemerintah terhadap media seringkali terjadi.

Namun, di sisi lain, lanskap media di Indonesia juga menunjukkan dinamika yang terus berkembang, terutama dengan kemunculan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan kebangkitan media sosial. Dinamika ini membuka ruang bagi munculnya suara-suara kritis dan alternatif, serta mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam wacana politik (Effendy, 2012).

Fungsi Utama Media Politik di Indonesia

- Sumber Informasi: Media massa menjadi sumber utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa politik, kebijakan pemerintah, dan isu-isu publik lainnya.

- **Arena Wacana Publik:** Media menyediakan ruang bagi publik untuk bertukar pikiran, berdebat, dan mengutarakan pendapatnya tentang berbagai isu politik.
- **Alat Sosialisasi dan Kampanye:** Media dimanfaatkan oleh aktor politik, seperti partai politik dan kandidat pemilu, untuk mensosialisasikan visi, misi, dan program mereka kepada publik.
- **Alat Kontrol Sosial:** Media dapat berperan sebagai alat kontrol sosial dengan menyoroti dan mengkritik kinerja pemerintah dan aktor politik lainnya.
- **Mobilisasi Politik:** Media dapat digunakan untuk memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam aksi politik, seperti demonstrasi atau pemungutan suara (Sumarno, 2016).

Branding Menggunakan Media Politik

Branding politik menggunakan media sosial merupakan strategi penting dalam konteks kampanye politik modern. Inti dari pendekatan ini adalah memanfaatkan platform media sosial untuk membangun citra dan mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat atau partai politik. Berikut beberapa poin kunci terkait branding politik menggunakan media sosial (Putri et al., 2022):

- **Membangun Identitas dan Citra:** Media sosial memungkinkan kandidat atau partai politik untuk menampilkan identitas mereka secara konsisten. Ini termasuk penyampaian pesan utama, nilai-nilai yang dipegang, dan visi masa depan, yang membentuk citra yang diinginkan di mata pemilih. Media sosial memungkinkan kandidat untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemilih, bypassing media massa tradisional (Nugroho, 2017).
- **Interaksi Langsung dengan Pemilih:** Platform media sosial memfasilitasi interaksi langsung antara kandidat atau partai politik dengan pemilih. Hal ini dapat meningkatkan rasa keterlibatan dan kepercayaan, karena pemilih merasa dapat berinteraksi secara langsung dan mendapatkan tanggapan langsung.
- **Penyebaran Pesan Secara Cepat dan Luas:** Informasi dan pesan politik dapat tersebar dengan cepat dan luas melalui media sosial. Konten yang menarik, viral, atau kontroversial dapat menjangkau audiens yang lebih besar daripada melalui media tradisional (Nurmandi, 2014).
- **Targeting dan Segmentasi Audien:** Media sosial memungkinkan untuk menargetkan dan mengelompokkan audien berdasarkan karakteristik demografis, geografis, atau perilaku. Ini memungkinkan kampanye untuk mengirim pesan yang lebih tepat sasaran dan relevan kepada kelompok pemilih tertentu.
- **Mengelola Krisis dan Menanggapi Isu:** Media sosial juga penting dalam mengelola krisis dan menanggapi isu-isu yang berkembang secara cepat. Kandidat atau partai politik dapat memberikan respons secara real-time terhadap kritik atau kontroversi yang muncul.

- **Monitoring dan Analisis Kinerja:** Media sosial menyediakan data yang berharga tentang kinerja kampanye, seperti jumlah interaksi, tingkat keterlibatan, dan sentimen publik. Analisis ini dapat membantu dalam mengevaluasi strategi dan membuat penyesuaian yang diperlukan.
- **Integrasi dengan Strategi Komunikasi Lainnya:** Penting untuk mencatat bahwa branding politik menggunakan media sosial sebaiknya tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan strategi komunikasi lainnya seperti media tradisional, kampanye tatap muka, dan kegiatan politik lainnya (Suryadinata dan Putranto, 2019).

Pada dasarnya, keberhasilan branding politik menggunakan media sosial tergantung pada keaslian pesan, konsistensi dalam penyampaian, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika cepat dunia digital.

Selain itu, penerapan Sistem Informasi Geografis (GIS) telah menjadi alat penting dalam memantau perubahan tutupan lahan dan degradasi hutan. Dengan teknologi ini, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran dan kawasan lindung secara akurat, serta menyesuaikan kebijakan tata ruang berbasis data spasial (Wahyuni, et al. 2021). Penggunaan citra satelit yang diolah melalui perangkat lunak GIS juga telah mendukung evaluasi tahunan terhadap perubahan fungsi lahan akibat ekspansi industri dan perkebunan (Maulana, H., & Siregar, 2020).

Pemerintah daerah, bekerja sama dengan sektor swasta seperti PT RAPP dan lembaga litbang, juga mulai mengembangkan sistem pengolahan limbah terpadu berbasis teknologi ramah lingkungan. Di antaranya adalah instalasi pengolahan limbah cair sawit (POME) menjadi energi biogas dan pupuk organik yang digunakan kembali di area perkebunan. Teknologi ini mampu menurunkan beban pencemaran air dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan limbah sebagai sumber daya alternative (GIMNI, 2021).

Selain pengolahan limbah, konsep Eco Industrial Park (EIP) telah mulai diinisiasi di kawasan Technopolitan Pelalawan. Kawasan ini dirancang untuk mengintegrasikan praktik industri yang efisien, rendah emisi, dan berprinsip sirkularitas dalam penggunaan bahan baku. Kehadiran kawasan ini menjadi simbol pergeseran orientasi pembangunan daerah dari ekstraktif menuju berwawasan lingkungan dan berbasis inovasi (BPPT & Pemkab Pelalawan, 2019).

Teknologi juga telah digunakan untuk digitalisasi layanan pengaduan dan perizinan lingkungan. Melalui aplikasi berbasis web dan mobile, masyarakat dapat melaporkan pencemaran atau pelanggaran lingkungan, serta memantau proses pengajuan izin usaha secara transparan. Inisiatif ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan (Pemerintah Kabupaten Pelalawan, 2023). Dalam

konteks pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah mulai menerapkan pendekatan teknologi partisipatif, seperti pemanfaatan drone oleh kelompok tani hutan untuk memantau batas wilayah kelola dan aktivitas ilegal di sekitar kawasan gambut. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat, tetapi juga memperkuat keterlibatan mereka dalam pelestarian sumber daya alam (PPSW Riau, 2022).

Peluang Penguatan Kebijakan Lingkungan Melalui Teknologi

Digitalisasi Layanan Perizinan dan Pengawasan Lingkungan

Transformasi digital dalam pelayanan publik telah diwujudkan melalui aplikasi "Klik Pelalawan", yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perizinan dan pengawasan lingkungan. Aplikasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Smart City di Kabupaten Pelalawan.

Pelibatan Masyarakat dan Industri Melalui Platform Teknologi

Pelibatan masyarakat dan industri dalam pengelolaan lingkungan dilakukan melalui forum multi-stakeholder yang bertujuan mempererat kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan isu-isu strategis di Kabupaten Pelalawan. Selain itu, pelatihan media digital marketing bagi pengrajin batik juga telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi.

Dukungan Regulasi dan Kolaborasi Multistakeholder

Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang mencakup strategi pengelolaan lingkungan berbasis teknologi. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga penelitian, juga dilakukan untuk memperkuat implementasi kebijakan lingkungan.

Tantangan Implementasi

Penerapan inovasi teknologi dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pelalawan menghadapi berbagai tantangan struktural, teknis, dan sosial-politik yang perlu dicermati secara mendalam. Tantangan-tantangan ini dapat menjadi penghambat signifikan jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.

Keterbatasan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Teknologi

Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di instansi lingkungan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Banyak petugas lapangan dan pejabat teknis belum memiliki kompetensi yang memadai dalam penggunaan alat dan sistem berbasis teknologi seperti Geographic Information System (GIS), perangkat sensor kualitas udara, maupun software pengolahan data lingkungan.

Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang stabil, sistem penyimpanan data berbasis cloud, dan perangkat keras modern belum tersedia secara merata, terutama di kawasan pedesaan dan pelosok gambut yang menjadi episentrum kerusakan lingkungan di Pelalawan. Kondisi ini mempersulit pengumpulan dan pemrosesan data lingkungan secara akurat dan tepat waktu (Fauzi & Rachman, 2021).

Resistensi Birokrasi terhadap Perubahan Teknologi

Penerapan inovasi seringkali berhadapan dengan resistensi dari dalam birokrasi sendiri. Aparatur sipil negara di daerah cenderung lebih nyaman menggunakan metode konvensional yang sudah mapan, meskipun kurang efisien dan akuntabel. Faktor seperti minimnya pemahaman terhadap manfaat jangka panjang dari teknologi lingkungan, kekhawatiran terhadap transparansi data, hingga budaya kerja yang kurang adaptif terhadap perubahan, menjadi penghambat utama dalam transformasi digital sektor lingkungan (Widodo & Pratama, 2020). Resistensi ini juga muncul dalam bentuk kebijakan yang tidak sinkron antarinstansi, di mana dinas lingkungan hidup, dinas perkebunan, dan dinas perizinan sering kali memiliki orientasi yang berbeda-beda terhadap inovasi dan keberlanjutan.

Keterbatasan Pendanaan dan Keberlanjutan Program Teknologi

Keterbatasan dana menjadi kendala klasik dalam pengembangan dan implementasi program teknologi lingkungan di daerah. Sering kali, anggaran yang dialokasikan masih bersifat minimalis dan bersumber dari program jangka pendek yang tergantung pada bantuan pusat atau hibah luar negeri. Ketergantungan ini menyebabkan keberlanjutan program inovatif menjadi rapuh, karena tidak didukung oleh struktur pembiayaan daerah yang konsisten (Sukma & Hartati, 2019).

Di sisi lain, skema insentif untuk sektor swasta dalam berinvestasi pada teknologi bersih juga masih belum jelas. Tidak adanya kepastian regulasi dan dukungan fiskal membuat banyak perusahaan enggan mengambil risiko dalam menerapkan inovasi teknologi yang relatif mahal pada awal implementasinya.

Fragmentasi dan Koordinasi Antarinstansi yang Lemah

Implementasi inovasi teknologi lingkungan membutuhkan koordinasi yang erat antarinstansi, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga kementerian teknis di pusat. Namun kenyataannya, proses ini sering kali terhambat oleh tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, serta perbedaan paradigma pembangunan antarlevel pemerintahan.

Sebagai contoh, program restorasi gambut dan pencegahan kebakaran lahan yang dijalankan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang daerah yang masih membuka peluang konversi lahan untuk perkebunan.

Ketidaksinergisan ini menciptakan kebijakan yang tidak konsisten dan menurunkan efektivitas teknologi yang sudah diterapkan (Purnomo & Rohmah, 2020).

Tantangan Sosial dan Budaya Lokal

Aspek sosial budaya juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan implementasi teknologi lingkungan. Di banyak desa di Pelalawan, pengetahuan tentang pentingnya keberlanjutan ekologi masih rendah. Kurangnya literasi teknologi menyebabkan masyarakat kesulitan memahami dan menerima sistem monitoring berbasis digital atau pengelolaan limbah dengan teknologi tinggi.

Selain itu, konflik sosial terkait penguasaan lahan, ketimpangan akses terhadap informasi lingkungan, serta hilangnya norma-norma adat dalam pengelolaan sumber daya alam, menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan pendekatan sosiokultural yang inklusif.

Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa penerapan inovasi teknologi dalam kebijakan lingkungan tidak dapat dilakukan secara sektoral atau teknokratis semata. Diperlukan pendekatan sistemik yang menggabungkan dimensi teknis, kelembagaan, sosial, dan ekonomi secara holistik. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada komitmen politik, kapasitas institusional, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan Pelalawan.

Implikasi Kebijakan

Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah dalam Mengadopsi dan Memperkuat Inovasi Teknologi

Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan lingkungan di Kabupaten Pelalawan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah proaktif dengan mengadopsi pendekatan kebijakan berbasis teknologi (*technology-driven policy*). Ini meliputi:

- Penguatan infrastruktur digital untuk pemantauan kualitas udara, air, dan tutupan lahan secara real-time. Implementasi sistem seperti *early warning system* berbasis IoT (*Internet of Things*) dan data satelit dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan cepat dan berbasis data saat terjadi bencana lingkungan seperti kebakaran lahan gambut (Setiawan & Hartanto 2022).
- Revitalisasi sistem perizinan lingkungan melalui digitalisasi, sehingga prosesnya lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Hal ini juga dapat mencegah praktik-praktik perizinan yang merugikan lingkungan akibat lemahnya pengawasan administratif (Widodo, A., & Pratama, 2021).

- Pengembangan kebijakan fiskal hijau (green fiscal policy), misalnya dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan, serta menerapkan disinsentif atau denda bagi yang mencemari lingkungan.

Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat daya saing daerah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mendorong transisi menuju ekonomi hijau (green economy) yang saat ini menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah dalam capaian SDGs.

Peran Penting Kemitraan antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil

Pengelolaan lingkungan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pendekatan kolaboratif berbasis multi-stakeholder governance menjadi kunci keberhasilan kebijakan lingkungan, terutama dalam konteks Pelalawan yang memiliki intensitas aktivitas industri tinggi. Beberapa strategi implementatif yang bisa dilakukan antara lain:

- Membangun forum konsultatif reguler antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas perencanaan dan evaluasi kebijakan lingkungan.
- Skema Public-Private Partnership (PPP) untuk membiayai pembangunan infrastruktur pengelolaan lingkungan, seperti fasilitas daur ulang sampah, sistem pengolahan limbah industri terpadu, dan restorasi lahan gambut.
- Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pelatihan teknologi. Pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga kawasan ekosistem penting, seperti melalui program ekowisata berbasis komunitas dan kegiatan penanaman kembali hutan (reforestation), akan memperkuat kesadaran ekologis secara kolektif.

Kemitraan yang setara antara aktor-aktor ini dapat mendorong terciptanya co-production of policy, yaitu kebijakan yang lahir dari kebutuhan dan partisipasi nyata para pemangku kepentingan.

Strategi Peningkatan Kapasitas SDM dan Integrasi Teknologi dalam Perencanaan Tata Ruang

Keberhasilan implementasi kebijakan berbasis inovasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perencanaan ruang yang berpihak pada lingkungan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan pada aspek ini mencakup:

- Pelatihan teknis berkelanjutan bagi ASN dan tenaga teknis di instansi lingkungan mengenai penggunaan teknologi lingkungan (seperti GIS, pengolahan data sensor lingkungan, dan audit lingkungan berbasis software).
- Kurikulum pendidikan lingkungan berbasis lokal perlu diperkuat, tidak hanya di sekolah tetapi juga melalui pelatihan masyarakat desa yang berada di sekitar kawasan rawan bencana ekologis.

- Integrasi data spasial dan ekologi ke dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW). Hal ini penting agar rencana pembangunan tidak tumpang tindih dengan kawasan lindung atau lahan gambut yang seharusnya dilindungi.

Kebijakan tata ruang yang berbasis pada prinsip *landscape approach* dapat memastikan bahwa keputusan pembangunan selalu mempertimbangkan nilai ekosistem, daya dukung lingkungan, serta risiko kerusakan jangka panjang. Pendekatan ini terbukti efektif diterapkan di berbagai daerah dengan tekanan ekologis tinggi.

Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pelalawan tidak hanya terletak pada seberapa besar anggaran atau teknologi yang digunakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan dirancang secara partisipatif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Inovasi teknologi perlu didukung oleh struktur tata kelola yang kuat, keterlibatan masyarakat yang luas, serta kebijakan yang progresif namun realistis. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Pelalawan berpotensi menjadi model pembangunan berkelanjutan di wilayah Sumatera bahkan nasional.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Era digital menghadirkan transformasi signifikan dalam lanskap komunikasi politik. Media sosial dan internet membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan mobilisasi politik yang efektif.

Namun, dinamika komunikasi politik di era digital juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti misinformasi, disinformasi, polarisasi politik, dan manipulasi opini publik. Hal ini dapat mengancam demokrasi dan partisipasi publik yang konstruktif.

Etika media menjadi esensial untuk membangun komunikasi politik yang sehat, bertanggung jawab, dan demokratis. Penerapan prinsip-prinsip etika media seperti akurasi, objektivitas, keseimbangan, dan akuntabilitas dapat membantu meminimalkan dampak negatif media sosial dan memaksimalkan potensi positifnya.

Upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, media massa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat luas, diperlukan untuk membangun ekosistem media yang sehat dan beretika. Peningkatan literasi media, edukasi etika jurnalistik, regulasi media yang efektif, dan kerja sama multi-pihak menjadi kunci untuk mewujudkan komunikasi politik yang bertanggung jawab di era digital.

Dinamika komunikasi politik di era digital merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan terus berkembang. Memahami dinamika ini dan menerapkan etika media secara

konsisten menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang demokratis, partisipatif, dan sejahtera.

Saran

Dalam menelaah dinamika komunikasi politik dalam masyarakat modern, penting untuk mengakui peran sentral yang dimainkan oleh media dalam membentuk opini publik dan proses politik secara keseluruhan. Etika media yang kuat dan dipatuhi adalah kunci untuk memastikan bahwa komunikasi politik berjalan dengan cara yang adil, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, transparansi, menghormati keanekaragaman pendapat, menghindari konflik yang tidak perlu, dan meningkatkan literasi media politik, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk demokrasi yang sehat dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimantara, B., & Mantoro, P. (2021). Dinamika komunikasi politik di era digital: Tantangan dan peluang bagi demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*, 52(2).
- Cahyawati, S. (2020). The impact of social media on public opinion and political behavior in the 2019 Indonesian presidential election. *Jurnal Ilmu Politik Universitas Indonesia*, 26(2).
- Cahyawati, S., & Nugroho, A. (2021). Media massa dan dinamika politik lokal di era digital: Studi kasus pemilihan kepala desa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 10(1).
- Effendy, T. (2012). Media massa dan demokrasi di Indonesia: Antara hegemoni dan kontestasi. *Jurnal Komunikasi*, 15(2).
- Hamidi, M. (2018). Media massa dan demokrasi lokal: Studi kasus pemberitaan pilkada bupati di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 7(1).
- Handayani, E., & Sugiyanto. (2020). Konstruksi media terhadap wacana politik identitas dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. *Jurnal Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 9(2).
- Hermin, I. W. (2007). Politik media dalam transisi politik: Dari kontrol negara menuju *self regulation mechanism*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1).
- Kodoati, M. C. (2023). Urgensi etika bagi komunikasi politik. *Jurnal Media*, 1(1).
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). (2024). Dinamika komunikasi politik: Memahami opini publik dalam era digital. *KPI*, 1(1).
- Nugroho, R. (2017). Memanfaatkan media sosial sebagai alat *branding* politik pada pemilihan kepala daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1).

- Nurhidayat, I., & Refian, R. (2023). *Jurnal Lanskap Politik*, 1(2), 1.
- Nurmandi, A. (2014). Politik di era media sosial: Studi komunikasi politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(3).
- Putri, D. M., Prisanto, G. F., Ernungtyas, N. F., & Putri, S. A. (2022). Personal branding politikus melalui media sosial. *Ganaya*, 5(1).
- Sumarno, K. (2016). Dinamika media massa di era demokrasi: Antara hegemoni dan kontestasi wacana. *Sosiologi Indonesia*, 33(1).
- Suryadinata, D. R., & Putranto, T. T. (2019). Politik di media sosial: Strategi kampanye Pemilu 2019 oleh partai politik di Indonesia. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(2).
- Susilo, A. (2019). *Framing* media terhadap wacana politik identitas dalam pemilihan presiden tahun 2019. *Jurnal Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 8(2).
- Susilo, A. (2022). Social media and political polarization in Indonesia: Evidence from the 2019 presidential election. *Jurnal Komunikasi*, 24(1).
- Tabroni, R. (2012). Etika komunikasi politik dalam ruang media massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2).
- Taufik, A. (2022). Tantangan dan solusi komunikasi politik di era digital: Perspektif Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga*, 18(2), 223–234.
- Widjaja, Y. (2021). The role of hoax and misinformation in the 2019 Indonesian presidential election. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 22(3).